

## **Peran Wanita dalam Pemberitaan Majalah Prisma pada Masa Orde Baru Tahun 1975-1996**

**Aulia Almaida, Agus Permana, Dina Marlina**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: auliamaida52@gmail.com

### **Abstract**

*Penelitian ini membahas terkait peran wanita dalam pemberitaan majalah prisma pada masa Orde Baru tahun 1975-1996. Sebagai sebuah media yang berada dalam naungan LP3ES, Prisma hadir dengan semangat pembangunan namun tetap memberikan ruang kritis terhadap berbagai isu sosial, termasuk persoalan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prisma menampilkan peran wanita tidak hanya sebagai objek domestik sebagaimana konstruksi gender dominan masa Orde Baru, melainkan juga sebagai subjek aktif dalam pembangunan pendidikan, ekonomi, media massa dan politik. Namun, pemberitaan tersebut tetap tidak lepas dari bias gender dan dominasi ideologi “ibuisme” Orde Baru yang menempatkan wanita dalam peran tradisional sebagai ibu dan istri. Dengan demikian Prisma menjadi salah satu media yang mencoba memberi wacana alternatif atas peran wanita, namun masih terkurung dalam struktur sosial dan politik yang patriarkal.*

**Keywords:** *wanita, majalah Prisma, Orde Baru, Pembangunan*

### **Pendahuluan**

Pers secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Press*, yang dalam bahasa Indonesia berarti percetakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara harfiah pers berarti cetak dan secara makna berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Pers memiliki peranan utama dalam masyarakat sebagai penyebar informasi dan kontrol sosial. Sebagai lembaga yang vital, pers menjadi alat utama untuk memahami kondisi dan keadaan suatu negara.<sup>1</sup>

Pada masa Orde Baru pers diharapkan berperan sebagai mitra pemerintah yang hanya menyuarakan suara pemerintah, dan menunjukkan citranya sebagai pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini pers bukan lagi “penggerak massa” tapi kemudian berganti menjadi “penggerak pembangunan bangsa”, segala yang berhubungan dengan aktivitas politik dan revolusioner dihilangkan dan digantikan dengan norma pancasila dengan tafsiran ala Orde Baru.

Di masa Orde Baru, keterlibatan perempuan dalam media sering dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, menjadikan perempuan sebagai objek konsumsi dan daya tarik pasar. Media perempuan banyak menampilkan citra yang sarat diskriminasi seksual dan tunduk pada doktrin *ibuisme*, yaitu ideologi yang

---

<sup>1</sup> Edwin Ariwanto, “Kebebasan Pers Serta Kritik Masyarakat Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru,” *Jurnal Lani : Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4 (2023): 107–10. Hlm 107-108

menempatkan perempuan dalam peran domestik sebagai pengabdian bagi suami, keluarga, dan negara.<sup>2</sup> Inilah yang menjadikan media massa Orde Baru bias gender terhadap wanita masa itu.

Bias gender dalam media merupakan bentuk penyimpangan dari fungsi pers yang bersifat edukatif. Padahal, wanita seharusnya mendapat kesempatan dan hak yang setara dengan pria. Cara media menggambarkan wanita sangat memengaruhi kesadaran masyarakat. Namun, media sering menampilkan wanita sebagai sosok lemah, pasif, dan terkungkung dalam ranah domestik. Padahal, menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers mencakup informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan ekonomi.<sup>3</sup>

Salah satu media massa yang memberitakan perempuan tidak hanya dalam aspek objek kecantikan dan doktrin Orde Baru semata adalah majalah prisma. Majalah Prisma menjadi salah satu media cetak terkemuka pada masa Orde Baru yang berbeda dengan majalah lainnya. Prisma lebih pragmatis dan berorientasi pada *problem solving*. Majalah prisma hadir sebagai cita cendekiawan tahun 70-an sampai 90-an yang merekam semua masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam cita-cita barunya menjalankan modernisasi.<sup>4</sup> Prisma hadir sebagai majalah pertama dengan citra “pers pembangunan”, yang menjadi titik tolak untuk menilai apa yang terjadi baik kondisi ekonomi-politik Indonesia ataupun yang lainnya.<sup>5</sup>

Wanita dibicarakan dan diberikan ruang dalam Prisma bukan semata untuk menarik pembaca yang penasaran akan bagaimana wanita akan dibicarakan dalam sebuah majalah pembangunan, tetapi bagaimana peran wanita dalam proses pembangunan Orde Baru juga disoroti. Prisma yang menyajikan edisi khusus terkait dengan wanita menjadi daya tarik penulis untuk melihat bagaimana wanita dalam wajah pembangunan Orde Baru.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang memiliki empat tahapan: heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran sumber), dan historiografi (penulisan sejarah). Pada tahap heuristik penulis menggunakan sumber primer berupa Majalah Prisma edisi wanita pada tahun 1975-1996 sebagai objek utama. Sumber-sumber yang didapat kemudian dikritisi baik secara eksternal maupun internal. Proses selanjutnya

---

<sup>2</sup> Wening Udasmoro, ed., *Dari Doing Ke Undoing Gender Teori Dan Praktik Dalam Kajian Feminisme* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2018). Hlm 146-147

<sup>3</sup> Ariwianto, “Kebebasan Pers Serta Kritik Masyarakat Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru.” 107-108

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur* (Yogyakarta: LKis, 2000). Hlm x

<sup>5</sup> Rustam Ibrahim, *Program Dan Tokoh LP3ES, Antara Idealisme Dan Strategi Bertahan Hidup* (Depok: LP3ES, 2021). Hlm 56

sumber yang sudah valid akan diinterpretasi dan kemudian berlanjut pada proses historiografi yakni penulisan sejarah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah Awal Berdirinya Majalah Prisma**

Pada 7 Juli 1970, seiring dibukanya keran modal asing di Indonesia, sekelompok cendekiawan dan warga Jakarta yang peduli pada isu sosial-ekonomi mendirikan lembaga nirlaba bernama BINEKSOS (Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial). BINEKSOS kemudian bekerja sama dengan Yayasan Friederich Naumann Stiftung (FNS) dari Jerman, dan membentuk badan pelaksana bernama LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) yang didanai sepenuhnya oleh FNS.<sup>6</sup>

Pendirian LP3ES merupakan reaksi dari kalangan intelektual, terutama tokoh-tokoh penting eks Partai Sosialis Indonesia dan Masjumi, dua partai yang dibubarkan Soekarno pada 1962. Beberapa pendirinya adalah mantan aktivis mahasiswa yang sebelumnya bersama militer berperan dalam menghancurkan PKI dan menjatuhkan Soekarno.<sup>7</sup> LP3ES didirikan pada Agustus 1971 sebagai lembaga alternatif perjuangan intelektual, hasil komunikasi lima tokoh: Nono Anwar Makarim, Ismid Hadad, Emil Salim, S.B. Joedono, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Penerbitan majalah Prisma merupakan salah satu program LP3ES yang dirancang untuk mempengaruhi kelompok terdidik dan para cendekia-cendekia. Secara tidak langsung Prisma menjadi sebuah majalah intelektual terpenting Orde Baru yang menjadi perekat antara birokrasi Orde Baru, kaum teknokrat yang menjadi inteligensia Orde Baru dan masyarakat bebas di luarnya.

Prisma lahir dari gagasan dan kreasi Ismid Hadad yang merupakan gabungan dari dua majalah yaitu, *Dialogue* yang merupakan majalah dari lembaga penerangan AS dan majalah *Daedalus* yang merupakan jurnal tempat cendekiawan dan ilmuwan terkemuka AS untuk berdialog dan berdebat. Prisma pada awal penerbitannya dalam segi fisik, ukuran dan halaman depan sangat mirip dengan *Dialogue*. Sedangkan dalam segi isi cenderung mengikuti *Daedalus*. Sebagaimana *Daedalus*, Prisma berharap kaum cendekiawan Indonesia dapat ke luar dari menara gading dan memancarkan gagasan dan pikirannya secara bebas kepada publik.<sup>8</sup>

Prisma nomor perdana terbit pada bulan November 1971 dan menunjukkan diri sebagai “Majalah Pembangunan”, dengan mengusung tema “Faktor-Faktor

---

<sup>6</sup> Ibrahim. Hlm 7

<sup>7</sup> Daniel Dhakidae, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm 443-444

<sup>8</sup> Ibrahim, *Program Dan Tokoh LP3ES, Antara Idealisme Dan Strategi Bertahan Hidup*. Hlm 20

Non-Ekonomi dalam Pembangunan”. Prisma menjadi majalah yang pertama di bidang ilmu-ilmu sosial (termasuk ekonomi) dan kemanusiaan yang diterbitkan di Indonesia. Nomor edisi perdana ini menyajikan banyak tulisan tentang pembangunan, antara lain ditulis oleh Soedjatmoko, Suhadi Mangkusuwondo, serta Dorodjatun Kuntjorojakti.<sup>9</sup>

Awalnya, Ismid Hadad menangani seluruh proses penerbitan Prisma, dari menghubungi penulis hingga mengoreksi cetak-coba. Kemudian, LP3ES mulai merekrut anggota redaksi seperti Fuad Hashem (1973), Rustam Ibrahim (1974), Aswab Mahasin (1975), Daniel Dhakidae (1976), Masmimar Mangiang (1977), Paulus Widiyanto (1978), dan Manuel Kaisiepo (1979). Sjahrir dan Ignas Kleden juga pernah menjadi redaktur tamu.<sup>10</sup>

Prisma tampil sebagai majalah pembangunan yang sejalan dengan semangat Orde Baru. Dengan desain sederhana dan ketebalan 92 halaman, oplah Prisma meningkat pesat dari 1.000 eksemplar menjadi 4.500 pada 1975. Majalah ini juga menerbitkan edisi berbahasa Inggris dua kali setahun untuk pembaca internasional, dengan redaktur seperti Erwin Ramedhan, Ida Soedjojo, dan Yulis Ismartono.

Akhir tahun 1970an sampai pada awal tahun 1980an merupakan masa keemasan dari majalah Prisma. Kejayaan ini beriringan dengan meningkatnya keragaman rubrik yang dihadirkan dalam setiap edisi. Setelah pengenalan rubrik "Dialog" sebagai pembuka, pada tahun 1978 majalah ini mulai menyajikan rubrik "Laporan Khusus" yang terbit secara triwulanan dan tidak selalu berkaitan langsung dengan tema utama edisi tersebut. Inovasi konten berlanjut pada tahun 1979 dengan hadirnya sejumlah rubrik baru, antara lain: "Dunia Ketiga" yang memuat terjemahan artikel terkait isu-isu yang dihadapi negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara; "Tesis" yang menyuguhkan ringkasan tesis atau disertasi dalam bidang ilmu sosial; serta "Tinjauan Buku" yang memuat ulasan konvensional disertai komentar ringkas terhadap karya yang dibahas. Diversifikasi rubrik ini memperluas pilihan bacaan bagi audiens dan memperkaya konten yang ditawarkan oleh Prisma, menjadikannya lebih relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang intelektual.

Para cendekiawan penulis Prisma didominasi oleh kalangan strata akademi tinggi, setelah itu diikuti oleh strata satu dan strata dua. Dominasi kaum akademik ini merupakan upaya untuk merangsang dan memberi saluran bagi pandangan-pandangan segar dan kritis dari generasi muda Indonesia.<sup>11</sup> Dalam perkembangannya Onghokham mengatakan jika Prisma sudah terjerumus dalam teknokrasi dan menjadi “anti-intelektual”. Prisma sudah mengambil alih wacana

---

<sup>9</sup> Ibrahim. Hlm 20

<sup>10</sup> Ibrahim. Hlm 22

<sup>11</sup> Dhakidae, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. hlm 468

Orde Baru dan menjadi Kawan seiring dalam wacana pembangunan.<sup>12</sup> Prisma mengubah desain sampul pada 1994 untuk bangkit kembali, namun dinilai menyimpang dari tujuan awal dan terdampak krisis Orde Baru. Edisi baru terbit Juli 1998, usai kejatuhan Soeharto, menandakan krisis yang menghantam keras Prisma. Terlihat perubahan harga yang naik menjadi Rp. 10.000 menjadi harga tertinggi sepanjang sejarah Prisma. Prisma berakhir bukan hanya karena modal yang meninggalkannya akan tetapi kaum pendukungnya juga perlahan meninggalkannya. Prisma berakhir pada tahun 1998 dan kembali terbit pada tahun 2009.<sup>13</sup>

### **Peran Wanita dalam Pemberitaan Majalah Prisma pada Masa Orde Baru**

Wanita dalam pemberitaan surat kabar atau media massa selalu mempunyai ruang tersendiri untuk bisa mengekspresikan dirinya. Mulai bermunculannya rubrik wanita menandakan jika wanita merupakan elemen yang cukup banyak menyita perhatian. Berbagai media berlomba-lomba menyajikan pemberitaan yang menarik bagi wanita, sampai lupa jika kehidupan wanita tidak hanya seputar kecantikan dan mode saja. Prisma semaksimal mungkin memuat berbagai tulisan terkait dengan wanita yang berfokus pada peranannya dalam pembangunan Indonesia. Nomor khusus yang diterbitkan Prisma untuk pembahasan wanita merupakan upaya Prisma memberikan pandangan dan ruang yang sama bagi mereka. Karena seperti yang dikatakan Ismid Hadad dalam pengantar redaksinya "...Dunia wanita masih merupakan kabut gelap, paling tidak remang-remang, di tengah terang benderangnya sinar surya pembangunan bangsa modern.... Jurnal ini tentu tidak ingin membiarkan masalahnya hanya terbenam dalam kabut tanda tanya belaka".<sup>14</sup> Dalam berbagai edisi wanita yang dikeluarkan setidaknya dapat dibagi menjadi peran domestik wanita dan publiknya.

### **Peran Domestik**

Tulisan T.O. Ihromi berjudul "Wanita sebagai Penerus Nilai-nilai kepada Generasi Muda" membahas peran domestik wanita yang tetap berdampak dalam pembangunan. Meski Orde Baru gencar melibatkan wanita sebagai tenaga kerja, wanita yang memilih fokus pada rumah tangga tidak otomatis tersisih dari proses pembangunan. Bahkan, Orde Baru juga menjalankan banyak program untuk wanita di ranah domestik. Namun, keterkaitan peran wanita dengan ranah domestik membuat peran mereka menjadi lebih terbatas.

T.O. Ihromi menjelaskan bahwa wanita sering terjebak dalam definisi ideal yang dibentuk masyarakat, baik sebagai ibu maupun individu. Pandangan yang

---

<sup>12</sup> Dhakidae. Hlm 484-485

<sup>13</sup> Dhakidae. Hlm 509

<sup>14</sup> Ismid Hadad, "Pengantar Redaksi," Prisma edisi wanita no. 5 Oktober 1975.

melekat pada wanita terkait fungsi biologisnya membuat mereka cenderung memilih pekerjaan yang dianggap “kewanitaan,” seperti juru rawat dan guru. Pendidikan dan pekerjaan yang diinginkan pun disesuaikan dengan sifat wanita. Pemikiran ini membatasi peran wanita, terutama di sektor publik, serta menegaskan pembatasan tempat wanita hanya pada fungsi rumah tangga dan proses reproduksi.<sup>15</sup>

Anggapan masyarakat yang masih keliru terkait peranan wanita yang dipersepsikan semata-mata menurut fungsi reproduksinya dengan sebutan ‘kodrat wanita’ tanpa memperhitungkan pertimbangan ekonomi dan sosialnya. Wanita menjadi seorang agen perubahan di lingkungan rumahnya, wanita membutuhkan citra yang lebih positif terhadap peranannya agar ia dapat menjadi tumpuan harapan, terutama dalam pembentukan kepribadian yang kuat bagi anak-anak dan keluarganya. Dengan demikian peran wanita dalam rumah sangat menentukan, karena kepribadian bangsa berawal dari sana.<sup>16</sup>

### **Peran Publik Wanita dan Pendidikan**

Pendidikan Indonesia masa Orde Baru diatur menjadi secara lebih sentralistik, dengan menggunakan kurikulum yang lebih terarah dan terstruktur.<sup>17</sup> Pendidikan menjadi salah satu fokus program dalam Repelita I, Mayling Oey mengatakan bahwa salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat pembangunan suatu masyarakat adalah tingkat kepandaian membaca dan menulis anggota-anggota masyarakat tersebut. Berdasarkan sensus pada tahun 1971 diketahui bahwa terdapat 21.111.845 wanita dalam rentang usia antara 10-44 tahun yang mengalami buta huruf. Pada tahun 1971 terjadi kenaikan tingkat kepandaian membaca dan menulis bagi wanita sebesar 16,2% dibandingkan dengan tahun 1961. Kenaikan ini juga lebih besar 3,9% dibandingkan dengan tingkat kepandaian membaca dan menulis bagi kaum pria pada tahun yang sama. Hal ini menandakan bahwa kaum wanita menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang terbuka untuk belajar membaca dan menulis. Meskipun kesempatan mengakses pendidikan belumlah merata, akan tetapi populasi bagi wanita yang berpendidikan meningkat drastis, meraka pula lah yang kemudian paling banyak berperan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> T.O Ihromi, “Wanita Sebagai Penerus Nilai-Nilai Kepada Generasi Muda,” *Prisma* (Jakarta, 1975). Hlm 73

<sup>16</sup> Nani Yamin. “Urusan Rumahtangga Tetap Nomor Satu”. Rubrik Dialog *Prisma* 7, 1981. Hlm 91-92

<sup>17</sup> Umi Salamah, “Gagasan W.S. Rendra Tentang Sistem Pendidikan Indonesia: Resistensi Terhadap Sistem Pendidikan Kekuasaan Orde Baru,” *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 2, no. 1 (2019): 20–40, <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v2i1.462>.

<sup>18</sup> Mayling Oey, “Beberapa Catatan Demografis Tentang Kemajuan Wanita Indonesia,” *Prisma* (Jakarta, 1975). Hlm 13-14

Pandangan masyarakat yang keliru masih menganggap bahwa wanita tidak perlu pendidikan tinggi dan sebaiknya membantu pekerjaan rumah atau segera menikah. Padahal, pemerintah telah berupaya meratakan akses pendidikan melalui Program Kerja dan Belajar (KEJAR) dan Wajib Belajar untuk anak usia 7–12 tahun, sebagai bagian dari Delapan Jalur Pemerataan sejak 1972. Dalam Pelita III, program KEJAR menggunakan Paket A yang mencakup pengetahuan umum, ditujukan bagi mereka yang tak sempat mengenyam pendidikan formal. Setelahnya, peserta diarahkan ke Kejar Usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>19</sup>

Fokus utama pemerintah Orde Baru dalam pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat para penguasa dalam pembangunan nasional, dengan mottonya “Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Para siswa dididik untuk dibentuk sebagai “pekerja” yang nantinya akan menjadi alat penguasa membangun sebuah kebijakan, dalam artian mereka mengeksploitasi intelektualitas rakyat demi hasrat penguasa.<sup>20</sup>

### **Wanita dan Pembangunan Ekonomi**

Prisma sebagai majalah ekonomi, cukup banyak membicarakan wanita dari segi perannya dalam pembangunan ekonomi Orde Baru. Dari pertengahan tahun 70an pemberitaan terkait wanita banyak mengambil tema soal kepincangan dalam kesempatan kerja, tingkat upah yang didapat oleh mereka, kerasnya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang sifatnya merugikan wanita, kemudian terkait wanita dan keluarga berencana dan sebagainya. Pemberitaan yang hadir merupakan respon dari program Repelita III dan IV yang mengharuskan wanita tergabung dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Astrid mengatakan bahwa wanita selain sebagai seorang istri diharapkan perannya dalam segala bidang, pandangan masyarakat terhadap wanita memberikan label bahwa kepandaianya dalam segala hal menjadikannya seorang ibu yang ideal. Para pengamat ekonomi menyebutkan bahwa wanita memang memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan akan tetapi dampak yang dirasakan oleh mereka juga semakin besar.<sup>21</sup> Jika motivasi wanita bekerja hanya sebagai pencari nafkah tambahan maka para ahli penduduk dan ahli ekonomi pembangunan mengatakan jika partisipasi wanita sangat penting dalam angkatan kerja, terutama ketika dihubungkan dengan kebijaksanaan di bidang pendudukan yang bertujuan menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Kondisi wanita yang

---

<sup>19</sup> Suradi Hp. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986). Hlm 255

<sup>20</sup> Sarfika Datumula, “Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja,” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2021): 56–78, <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>.

<sup>21</sup> Astrid S. Susanto, “Wanita Desa Dan Pembangunan,” *Prisma* (Jakarta, 1975).

bekerja dalam industri dan pembangunan memiliki beberapa kecenderungan global seperti : wanita hidup di bawah kontrol sosial berdasarkan tradisi dan pemikiran-pemikiran yang sudah tertanam untuk wanita, wanita menghadapi masalah tugas-tugas dan peran ganda; rata-rata jam kerja wanita adalah 80-105 jam per minggu dalam tugas ganda mencari nafkah (bekerja) dan tugas rumah tangga dengan upah penghasilan yang didapat sedikit.<sup>22</sup>

Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sejak 1960-an menunjukkan bahwa perempuan mulai diterima dalam pasar kerja. Namun, kehadiran mereka sering kali dimanfaatkan oleh industri yang membayar lebih rendah daripada laki-laki, sehingga ketimpangan tetap terjadi. Perempuan dihadapkan pada jam kerja tinggi dan perlakuan yang tidak adil, termasuk pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.<sup>23</sup> Pemerintah sebenarnya telah mengatur perlindungan tenaga kerja perempuan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Namun, regulasi yang didasarkan pada anggapan "kodrat perempuan" justru membatasi ruang gerak dan peluang karier mereka.<sup>24</sup> Terdapat juga sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat untuk mengatur tenaga kerja wanita, yang tujuan utamanya sebagai perlindungan kepada wanita atas kodratnya, seperti larangan bekerja pada waktu malam hari, larangan melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan kesusilaan misalnya bekerja di dalam tambang bawah tanah, terkait aturan wanita yang bekerja lembur dan wanita yang menikah.<sup>25</sup>

Wanita yang tersisih dari industri dan pertanian akhirnya berharap di bidang jasa. Dalam pegawai negeri, wanita memiliki posisi setara pria, tanpa perbedaan gaji, sesuai UU No. 8/1974, kecuali soal poligami dan kehamilan. Namun, wanita lebih banyak bekerja di departemen pendidikan dan kesehatan, yang dianggap "kewanitaan," karena peran wanita masih dipersepsikan hanya sebagai pengasuh dan pengajar.<sup>26</sup>

Meningkatnya peranan wanita dalam ekonomi Orde Baru menimbulkan istilah "Feminisasi kegiatan ekonomi" yang dikeluarkan dalam edisi khusus *Prisma* atas respon terkait banyaknya dominasi wanita dalam industri. Namun, struktur sosial patriarkal dan sudut pandang yang melihat perempuan sebagai objek terus mereproduksi ketimpangan gender. Kapitalisme pun memanfaatkan citra

---

<sup>22</sup> Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, and Afan Gaffar, *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum Di Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2001). Hlm 37-38

<sup>23</sup> Katjasungkana, Soetrisno, and Gaffar. Hlm 48

<sup>24</sup> Hardjito Notopuro, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979). Hlm 89

<sup>25</sup> Notopuro. Hlm 90-91

<sup>26</sup> Martha G. Logsdon, "Pegawai Negeri Sipil Wanita Di Indonesia," *Prisma* (Jakarta, 1985). Hlm 86



“kelemahan biologis perempuan” untuk kepentingan ekonomi, memperparah marginalisasi dan eksploitasi perempuan dalam dunia kerja.<sup>27</sup> Ketimpangan dalam ekonomi juga dapat dilihat dalam tindakan sewenang-wenang yang dialami oleh wanita, seperti kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.<sup>28</sup>

### **Wanita dan Media Massa**

Citra wanita terbentuk dari wacana tradisional yang mengkondisikan wanita dalam ranah domestik. Prisma, sebagai pers Orde Baru, turut mengangkat perhatian terhadap hal ini melalui tulisannya tentang pandangan dan perjuangan wanita di media massa saat itu. Media massa yang bersifat persuasif sering digunakan sebagai alat propaganda pemerintahan. Topik wanita menarik perhatian sehingga banyak rubrik khusus tentang wanita muncul. Pemberitaan media mencerminkan dan membentuk wacana yang berkembang dalam masyarakat.

Secara tersirat majalah wanita memberikan pengajaran jika para wanita jangan meninggalkan kodratnya. Setiap majalah wanita yang hadir tentunya penuh pertimbangan dengan maksud membebaskan wanita dari belenggu-belenggu yang membatasinya. Di sisi lain tetap terselip pesan-pesan untuk jangan mengambil risiko dalam pembebasan ini dengan jangan meninggalkan kodrat kewanitaan.<sup>29</sup>

Media perfilman juga tidak luput dari bagaimana peran wanita dapat digambarkan. Pada saat itu hanya satu orang wanita bernama Sofia, W.D dari 115 nama lainnya yang tercatat sebagai sutradara dan satu wanita, Tatiek Mayati di antara 25 penulis scenario, 8 wanita dari 65 produser, maka bisa dikatakan jika pria mendominasi dunia perfilman dari segi jumlah. Akibatnya, sudut pandang pria mendominasi penggambaran wanita dalam film, yang sering menampilkan wanita ideal sebagai sosok pasif, menderita tanpa protes, dan menyimpan perasaan dalam hati, seperti tokoh Ayu dalam film *Rembulan dan Matahari*.<sup>30</sup>

Dalam industri perfilman Indonesia, perempuan sering dijadikan komoditas untuk menarik keuntungan, sejalan dengan pandangan bahwa film adalah barang dagangan yang dinilai berdasarkan laba-rugi. Ryadi Gunawan menyoroti bahwa narasi film kerap mengeksploitasi kisah perempuan, bukan untuk menggambarkan realitas, melainkan untuk memenuhi selera pasar. Hal ini menjadi perhatian gerakan feminis, yang mendorong representasi perempuan yang lebih beragam, positif, dan sesuai kenyataan. Sayangnya, film Indonesia saat itu cenderung membatasi perempuan dalam tiga tipe cerita: sebagai istri, sebagai perempuan lajang, dan

---

<sup>27</sup> Irwan Abdullah, “Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi,” *Prisma* (Jakarta, 1995). Hlm 10-11

<sup>28</sup> Abdullah. Hlm 12-13

<sup>29</sup> Toeti Heraty Noerhadi, “Wanita Dan Citra Diri,” *Prisma* (Jakarta, 1981). Hlm 61

<sup>30</sup> Krishna, “Wajah Wanita Dalam Filem Indonesia : Beberapa Catatan,” *Prisma* (Jakarta, 1981). Hlm 32-33

dalam kaitannya dengan hak-hak otonomi.<sup>31</sup> Film berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Namun, pada masa Orde Baru, film Indonesia cenderung menampilkan citra perempuan secara klise dan menyederhanakan realitas mereka. Alih-alih menjadi alat perubahan, film justru memperkuat stereotip gender dan berisiko menghambat perjuangan kesetaraan.<sup>32</sup>

### **Wanita dan Politik**

Melalui kudeta yang terjadi pada tahun 1965 terjadi perubahan politik yang secara alamiah menghendaki stabilitas politik sehingga organisasi wanita yang ada menjadi tidak terlalu menonjol. Jika pada pemerintahan Orde Lama wanita diberikan kebebasan dan peluang dalam politik, maka sistem Orde Baru menempatkan posisi gerakan wanita pada wilayah privat/domestik.

Wanita sudah seharusnya memiliki hak politik yang sama dengan pria. Persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengandung arti bahwa wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam bidang aparatur pemerintah.<sup>33</sup> Prisma menyoroti jika landasan hukum tersebut belum mencakup semua hak politik wanita karena keterlibatan wanita dalam politik sebagian besar mempunyai suami yang bekerja sebagai pegawai negeri (sipil atau ABRI). Politisi wanita dikatakan bisa mendapat posisi dalam pemerintahan karena jasa jabatan suaminya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfar diketahui bahwa politisi wanita ini mengaku sebanyak 36% suaminya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan 32% ABRI. Hal demikian menjadikan sikap politik yang dilakukan para wanita ini pada intinya harus sama dengan politik suaminya.

Dalam rubrik dialog Prisma bersama Ibu Aisyah Amini, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR-RI masa itu mengungkapkan jika peran wanita masih kurang dalam politik, karena dunia politik dengan gambaran yang keras masih dirasa tidak relevan dengan kelembahlembutan wanita. Budaya seperti ini tidak akan berubah jika wanita masih diliputi ketakutan untuk terjun di dalamnya dan tidak diberikan kesempatan yang sama.<sup>34</sup>

Dalam permainan politik Indonesia, memang cukup banyak istri-istri pejabat yang bisa dikatakan secara “tiba-tiba” menjadi anggota legislatif atau MPR.

---

<sup>31</sup> Pengantar Redaksi. “Film Indonesia : Demi Mutu atau Selera Pasar?”. Prisma (Jakarta, 1990)

<sup>32</sup> Sita Aripurnami, “Sosok Perempuan Dalam Film Indonesia,” *Prisma* (Jakarta, 1990). Hlm 64

<sup>33</sup> Moelyoto Tjokrowinoto, Jang Aisjah Muttalib, and Poedjiwati Sayogyo, *Analisa Situasi Wanita Indonesia* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1994). Hlm 11-12

<sup>34</sup> Aisyah Amini, “Masalahnya Hanya Kaitan Kesempatan dan Kemampuan”. Rubrik Dialog *Prisma*, 1996. Hlm 62

Walaupun secara formal mereka diajukan sebagai calon legislatif melalui jalur organisasi-organisasi perempuan, kenyataannya Pada masa Orde Baru, banyak perempuan masuk dunia politik karena status sebagai istri pejabat, bukan karena kapasitas pribadi. Organisasi seperti Dharma Wanita lebih berfungsi sebagai perpanjangan simbolik kekuasaan laki-laki, bukan sebagai ruang pemberdayaan perempuan yang mandiri. Prisma menyoroti bagaimana organisasi perempuan pada masa Orde Baru mengalami pergeseran fungsi, dari wadah pemberdayaan menjadi alat kontrol politik. Pemerintah memanfaatkan organisasi-organisasi ini untuk menanamkan kepatuhan, sehingga perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang sebelumnya mereka miliki.

Jika menarik sebuah kesimpulan terhadap sikap dan peran politik berbagai organisasi wanita ini, Organisasi seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK tidak independen dan mengikuti politik gender Orde Baru. Peran mereka lebih berfokus mendukung tugas suami sebagai aparat negara, dengan kegiatan yang dibatasi oleh ideologi ‘kodrat wanita’.<sup>35</sup> Kemudian untuk organisasi istri otonom yang meliputi Perwari, IWAPI dan berbagai ikatan organisasi istri berprofesi tertentu merupakan organisasi yang juga menganut sistem politik gender Orde Baru. Mereka terfokus pada mendukung program pemerintah dan berpartisipasi dalam program nasional.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Majalah Prisma terbit sejak 1971 dan digagas oleh Ismid Hadad, fokus pada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai program LP3ES, Prisma bertujuan memengaruhi intelektual dan birokrat di pemerintahan serta dunia akademik. Majalah ini menjadi media intelektual penting pada masa Orde Baru, menghubungkan birokrasi, teknokrat, dan masyarakat.

Pemberitaan wanita di Prisma menyoroti peran penting mereka di berbagai bidang. Di domestik, wanita dianggap penerus nilai budaya pada anak. Di ranah publik, Prisma membahas peran wanita dalam pendidikan (mengurangi buta huruf dan mendukung pembangunan ekonomi), ekonomi (dominan di sektor formal dan informal), media massa (sebagai pelaku dan objek dalam film dan sastra), serta politik (ikut serta dalam organisasi dan legislatif, meski persentasenya masih kecil dibanding pria). Meski masih berada dalam kerangka ideologi Orde Baru, terutama dengan dominasi konsep *ibuisme*, Prisma berupaya menampilkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Namun demikian, ketimpangan gender dan marginalisasi tetap menjadi isu yang menonjol, baik dalam ruang publik maupun dalam ranah media. Pemberitaan Prisma menunjukkan bahwa representasi

---

<sup>35</sup> Ruth Indiah Rahayu, “Politik Gender Orde Baru Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-An,” *Prisma* (Jakarta, 1996). Hlm 40

media sangat mempengaruhi pembentukan citra perempuan dan kesadaran sosial masyarakat terhadap kesetaraan gender.

### **Daftar Sumber**

- Abdullah, Irwan. "Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi." *Prisma*, Jakarta, 1995.
- Aripurnami, Sita. "Sosok Perempuan Dalam Film Indonesia." *Prisma*, Jakarta, 1990.
- Ariwianto, Edwin. "Kebebasan Pers Serta Kritik Masyarakat Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru." *Jurnal Lani : Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4 (2023): 107–10.
- Budiastuti, Liliek, and Mochamad Gifari. "Representasi Perempuan Dalam Majalah Wanita." *Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2008).
- Datumula, Sarfika. "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2021): 56–78. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- G. Logsdon, Martha. "Pegawai Negeri Sipil Wanita Di Indonesia." *Prisma*, Jakarta, 1985.
- Hadad, Ismid. "Pengantar Redaksi," 1975.
- Heraty Noerhadi, Toeti. "Wanita Dan Citra Diri." *Prisma*, Jakarta, 1981.
- Hp., Suradi, Mardinas Safwan, Djuariah Laticonsina, and Samsurizal. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- Ibrahim, Rustam. *Program Dan Tokoh LP3ES, Antara Idealisme Dan Strategi Bertahan Hidup*. Depok: LP3ES, 2021.
- Ihromi, T.O. "Wanita Sebagai Penerus Nilai-Nilai Kepada Generasi Muda." *Prisma*, Jakarta, 1975.
- Indiah Rahayu, Ruth. "Politik Gender Orde Baru Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-An." *Prisma*, Jakarta, 1996.
- Katjasungkana, Nursyahbani, Loekman Soetrisno, and Afan Gaffar. *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum Di Zaman Orde Baru*.

- Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2001.
- Krishna. "Wajah Wanita Dalam Filem Indonesia : Beberapa Catatan." *Prisma*, Jakarta, 1981.
- Kusumastuti, Frida. "Perkembangan Dan Tantangan Pers Wanita Dalam Industri Pers." *Bestari*, 1994.
- Notopuro, Hardjito. *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Oey, Mayling. "Beberapa Catatan Demografis Tentang Kemajuan Wanita Indonesia." *Prisma*, Jakarta, 1975.
- S. Susanto, Astrid. "Wanita Desa Dan Pembangunan." *Prisma*, Jakarta, 1975.
- Salamah, Umi. "Gagasan W.S. Rendra Tentang Sistem Pendidikan Indonesia: Resistensi Terhadap Sistem Pendidikan Kekuasaan Orde Baru." *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 2, no. 1 (2019): 20–40. <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v2i1.462>.
- Tjokrowinoto, Moelyoto, Jang Aisjah Muttalib, and Poedjiwati Sayogyo. *Analisa Situasi Wanita Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1994.
- Udasmoro, Wening, ed. *Dari Doing Ke Undoing Gender Teori Dan Praktik Dalam Kajian Feminisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gusdur*. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Wisesa, Dwi Arya. *Profil Dan Pendapat Kenangan 30 Tahun LP3ES*. Jakarta: LP3ES, 2001.